

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber keuangan yang paling utama di suatu daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan disuatu daerah otonom. Adapun pendapatan Asli daerah itu meliputi : a) Hasil Pajak Daerah; b) Hasil Retribusi Daerah; c) Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD yang sah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah harus terus menggali sumber-sumber PAD di daerahnya dengan semaksimal mungkin, mengelolanya sebaik mungkin, serta mengkaji atau mengevaluasi apakah sumber-sumber PAD tersebut sudah efektif, karena ada masyarakat yang sangat berharap kesejahteraannya terjamin oleh pemerintah.

Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 43.053.732 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 28.282.915 jiwa (65,69 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 14.770.817 jiwa (34,31 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 0,41 persen di Kota Banjar hingga yang tertinggi sebesar 11,08 persen di Kabupaten Bogor.

Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan salah satu provinsi yang mempunyai banyak potensi dalam Pendapatan Asli Daerah, dengan populasi yang cukup tinggi dan tersebar di beberapa kota dan perkampungan memungkinkan semakin banyak pula pajak dan retribusi yang akan didapatkan oleh daerah untuk kesejahteraan daerah tersebut, adapun potensi dari retribusi daerah paling besar adalah dari segi retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Tercatat pada tahun 2018 Provinsi Jawa Barat berada pada urutan ketiga di Indonesia dari jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya yaitu sebesar 17,6 Triliun, setelah pada urutan pertama yaitu DKI Jakarta dengan jumlah pendapatan asli daerahnya sebesar 43,3 Triliun dan pada urutan kedua yaitu Provinsi Jawa Timur dengan jumlah pendapatan asli daerahnya sebesar 18,5 Triliun. Adapun tiga daerah dengan jumlah PAD terendah yaitu Gorontalo dengan jumlahnya sebesar 384,4 Miliar, Sulawesi Barat 301,5 miliar dan yang paling rendah yaitu Provinsi Maluku Utara yang jumlah PAD nya sebesar 190,9 miliar. Dari fakta tersebut, kita akan berasumsi bahwa pengelolaan dan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut juga baik. Dari kedua sumber PAD yaitu pajak dan retribusi, pajak seringkali mendominasi

kontribusinya dalam PAD. Sedangkan akhir-akhir ini retribusi tidak terlalu difokuskan oleh segelintir pengambil kebijakan, padahal pada beberapa daerah retribusi justru menjadi sumber terbesar pendapatan daerah. Intinya sebagai salah satu sumber kontributor dari PAD, pendapatan retribusi perlu untuk dimaksimalkan.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bapenda Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas serta kewenangan dalam menjalankan salah satu urusan pemerintahan yaitu dalam bidang Pendapatan Daerah didasarkan pada otonomi dan tugas lain yaitu tugas pembantuan. Dan salah satu pendapatan daerah yang dikelola adalah retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan bentuk pembayaran dari individu maupun badan kepada pemerintah daerah karena kepentingannya baik itu dari segi jasa maupun perizinan telah terpenuhi oleh pemerintah sebagai penyedia. Adapun retribusi daerah itu diatur di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan juga khususnya di Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 14 Tahun 2011 mengenai Retribusi Daerah. Adapun Retribusi daerah sejatinya merupakan komponen dari PAD yang penting dalam pembiayaan pemerintahan. Maka retribusi harus ditingkatkan semaksimal mungkin. Adapun upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah yaitu dengan cara mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerah.

Berikut data mengenai Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah yang diambil berdasarkan Data Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014 s.d. 2019.

**Tabel 1. 1**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2014-2019**

<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>TARGET (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>PRESENTASE %</b>
2014	61.620.227.000,00	70.081.405.577,00	113,73
2015	59.015.099.855,00	73.410.055.968,00	124,39
2016	69.945.837.950,00	73.564.738.396,00	105,17
2017	60,017,945,501.00	60,273,043,774.00	100,43
2018	45.267.605.170,00	49.176.487.699,00	108,63
2019	53.183.796.175,00	56.222.370.756,00	105,71

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2019

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut terlihat bahwa realisasi retribusi daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014-2019 ini melebihi target yang telah ditentukan, artinya target dari retribusi telah tercapai dengan baik apabila dilihat dari target dan realisasinya pada tahun tertentu. Akantetapi realisasi dari setiap tahunnya mengalami fluktuatif, dan cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sampai ke tahun 2018 yaitu yang semula realisasi mencapai Rp. 73.564.738.396,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 60.273.043.774,00 pada tahun 2017 kemudian kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 49.176.487.699,00 pada realisasi tahun 2018 lalu mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu Rp. 56.222.370.756,00.

Adapun penyebab penurunan realisasi retribusi daerah Provinsi Jawa Barat dari setiap tahunnya yaitu disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat tentang peralihan wewenang pemungutan retribusi tertentu di provinsi beralih menjadi wewenang kabupaten/kota sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pada sumber-sumber retribusi tertentu. Adapun kebijakan tersebut yaitu terdapat pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah daerah pasal 15 ayat 4 membahas mengenai adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang kemudian apabila ada perubahan pada urusan pembagiannya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Adapun hal tersebut dapat dilihat dari data realisasi sumber-sumber retribusi daerah Provinsi Jawa Barat berikut ini.

**Tabel 1. 2**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2014-2019**

<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>TARGET (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>PRESENTASE %</b>
2014	41.610.592.000,00	48.957.166.838,00	117,66
2015	32.860.643.200,00	39.774.668.223,00	121,04
2016	38.900.415.800,00	37.508.047.812,00	96,42
2017	26.781.842.526,00	25.681.507.471,00	95,89
2018	10.948.910.000,00	11.757.064.375,00	107,38
2019	13.263.275.000,00	15.059.181.381,00	113,54

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2019

**Tabel 1. 3**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Provinsi Jawa Barat pada**  
**Tahun Anggaran 2014-2019**

<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>TARGET (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>PRESENTASE %</b>
2014	17.019.635.000,00	19.952.959.979,00	117,23
2015	19.970.296.655,00	25.672.870.105,00	128,56
2016	23.880.422.150,00	27.664.063.104,00	115,84
2017	24.879.488.300,00	25.661.759.358,00	103,14
2018	27.626.068.470,00	30.541.102.533,00	110,55
2019	32.616.597.675,00	34.646.809.075,00	106,22

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2019

**Tabel 1. 4**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Provinsi Jawa Barat**  
**pada Tahun Anggaran 2014-2019**

<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>TARGET (RP)</b>	<b>REALISASI (RP)</b>	<b>PRESENTASE %</b>
2014	2.990.000.000,00	1.171.278.760,00	39,17
2015	6.184.160.000,00	7.962.517.640,00	128,76
2016	7.165.000.000,00	8.392.627.480,00	117,13
2017	8,356.614.675,00	8.929.776.945,00	106,86
2018	6.692.626.700,00	6.878.320.791,00	102,77
2019	7.303.923.500,00	6.516.380.300,00	89,22

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2019

Dari tabel di atas data realisasi dari setiap jenis atau sumber-sumber retribusi mengalami fluktuatif, baik itu dari realisasi retribusi jasa umum, realisasi retribusi jasa usaha, maupun realisasi retribusi perizinan tertentu. Pada retribusi jasa umum, realisasi setiap tahunnya cenderung menurun, adapun realisasi dengan nilai paling tinggi terjadi tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 48.957.166.838,00 dan realisasi

terendah terjadi pada tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 11.757.064.375,00. Untuk retribusi jasa usaha, realisasinya juga cenderung fluktuatif, adapun realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 34.646.809.075,00 sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 19.952.959.979,00. Kemudian, untuk retribusi perizinan tertentu juga mengalami fluktuatif dengan realisasi paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 8.929.776.945,00 dan realisasi paling rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu Rp. 1.171.27.760,00.

Dalam retribusi daerah untuk menilai tinggi rendahnya suatu penerimaan diperlukan beberapa teknik analisis yaitu analisis pertumbuhan dan analisis derajat kontribusi. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis tersebut.

Berdasarkan data dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pendapatan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019”**.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertumbuhan pendapatan Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Barat yang cenderung fluktuatif.
2. Pertumbuhan pendapatan dari jenis-jenis retribusi cenderung fluktuatif pada retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

3. Pendapatan retribusi daerah yang rendah akan berdampak pada kontribusi Retribusi Daerah dalam menunjang Pendapatan asli daerah.
4. Pendapatan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu berdampak pada kontribusinya dalam menunjang pendapatan asli daerah.
5. Provinsi Jawa Barat sebagai peringkat tiga dari jumlah pendapatan asli daerah se-Indonesia pada tahun 2018, tetapi pendapatan retribusi daerah pada tahun tersebut mengalami penurunan.
6. Kebijakan Pemerintah pusat mengakibatkan fluktuatif nya retribusi daerah di Provinsi Jawa Barat.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan dan derajat kontribusi Retribusi daerah pada Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam mengelola retribusi daerah?
3. Bagaimana upaya atau strategi Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan dan Mengoptimalkan pendapatan Retribusi Daerah?

### **D. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan derajat kontribusi Retribusi daerah pada Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019.
- 2 Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam mengelola retribusi daerah.



- 3 Untuk mengetahui upaya atau strategi Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan dan Mengoptimalkan penerimaan Retribusi Daerah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari mengenai retribusi daerah serta dapat membuktikan apakah dengan variabel maupun teori yang berbeda dapat mendukung penelitian sebelumnya dan akan memberikan hasil yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan salah satu persyaratan Tugas akhir kuliah dan dengan penelitian ini pula peneliti dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah peneliti dapatkan selama perkuliahan pada masalah yang didapatkan pada kehidupan secara nyata.

- b. Bagi Instansi

Peneliti berharap sekiranya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan pendapatan khususnya pada pendapatan retribusi daerah.

c. Bagi Umum

Peneliti berharap penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat bermanfaat dalam bidang keilmuan dan sebagai informasi bagi orang-orang yang membutuhkan informasi terkait masalah yang akan peneliti teliti.

## F. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik merupakan suatu kerjasama yang dilakukan sekelompok orang atau lembaga yang bertujuan agar kebutuhan publik terpenuhi secara efisien dan efektif (Pasolong, 2017: 9)

Keuangan Daerah yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk pemungutan terhadap kekayaan yang dimiliki daerah serta kewajiban daerah dalam membelanjakan uang atau kekayaan tersebut demi berjalannya roda pemerintahan di suatu daerah yang tentu saja pelaksanaannya didasarkan pada peraturan yang berlaku di daerah tersebut. (Siregar, 2015: 12)

Adapun sumber-sumber PAD menurut Undang-undang No. 9 Tahun 2015 terdiri dari: 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) PAD sah lainnya.

“Retribusi Daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kebutuhan perseorangan maupun badan terkait jasa maupun perizinan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurutnya pula retribusi daerah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, serta perizinan tertentu” (Mardiasmo, 2009: 14-15).

Menurut Mahmudi (Mahmudi, 2019: 134) Perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melihat seberapa mampu suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Melalui Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis Pendapatan Daerah, yaitu meliputi:

## 1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

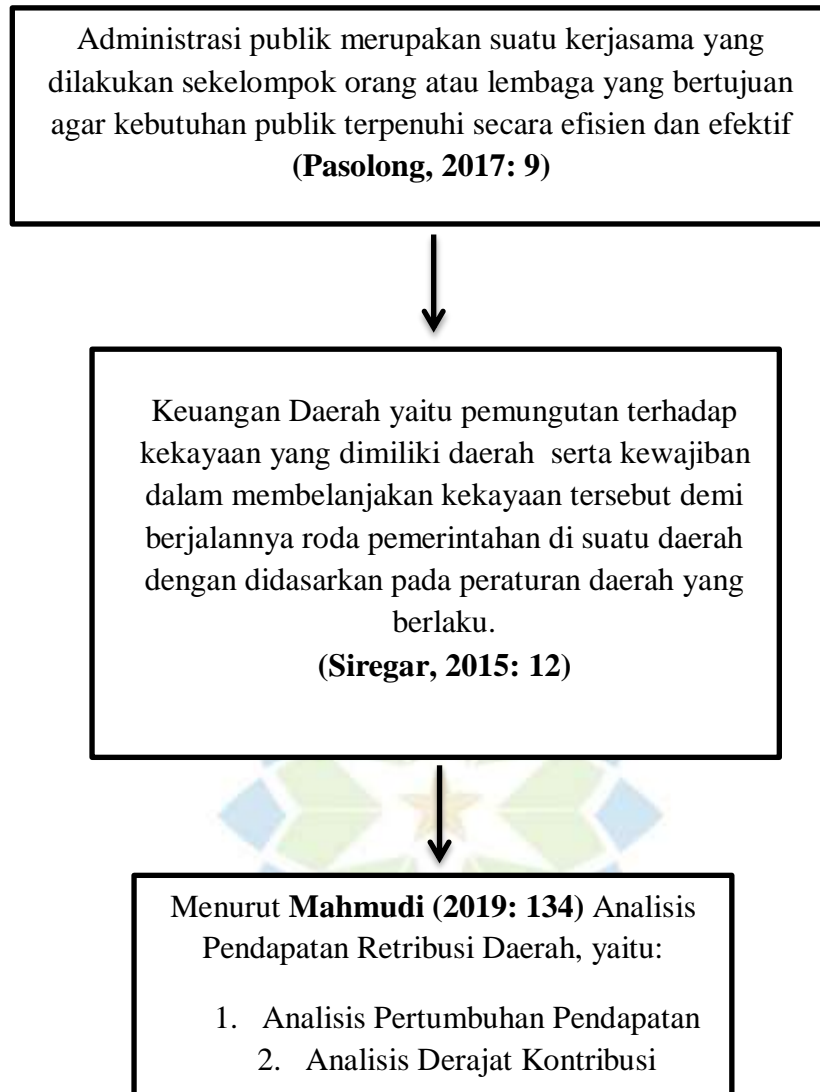
“Analisis pertumbuhan pendapatan ini berguna untuk mengetahui bagaimana kinerja anggaran pemerintah daerah dalam beberapa periode apakah mengalami pertumbuhan atau justru mengalami penurunan. Hal tersebut juga tidak semata mengetahui pertumbuhan atau penurunannya saja akantetapi harus pula dicari apa saja yang mengakibatkan terjadinya hal tersebut” (Mahmudi, 2019: 137).

“Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) dengan menggunakan rasio ini dapat mengetahui keberhasilan pendapatan daerah dari setiap periode apakah meningkat atau justru mengalami penurunan. Setelah hal tersebut diketahui maka akan dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi apa saja yang harus diperbaiki” (Halim, 2004: 291).

## 2. Analisis Derajat Kontribusi

“Rasio derajat kontribusi bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi dalam hal ini retribusi daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan hasil penerimaan retribusi daerah dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah” (Mahmudi, 2019: 143).

Rasio Kontribusi bermanfaat agar pemerintah daerah mengetahui seberapa besar kontribusi dari komponen-komponen retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2004: 163).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI

**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian, analisis pendapatan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019 akan optimal apabila berdimensi analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis derajat kontribusi.